



Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (JELAS) is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Accepted May 14, 2024, Approved June 14, 2024, Published July 21, 2024

Pengaruh Kebijakan Pemerintah Terhadap Hubungan Sosial Masyarakat di Kota Aek Kanopan

Wulan Sari¹, Romi Mesra²

¹*Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Terbuka*

²*Program Studi Pendidikan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negri Manado*

Email: ¹wulansa456@gmail.com, ²romimesra@unima.ac.id

Abstract. Society is defined as a group of people who interact with each other in a social relationship. Social problems are a mismatch between expectations (in the form of the realization of the values upheld by society) and reality. The aim of this research is for society to become better organized in its relationships with each other without violating the existing regulations in the social environment in which it is located. Apart from that, the benefit that will be obtained from this research is that the government will receive high appreciation from the public for its policies that bring changes to improve prosperity in the areas of poverty and unemployment in Indonesia. This study uses a qualitative method. The data collection techniques used were in-depth interviews, observation, and focused discussions. The results of the research show that government policies have a direct impact on increasing public awareness because these policies can increase public awareness about the importance of cooperation and coordination in improving the quality of life in Aek Kanopan City. Government programs that encourage cooperation between residents in social activities, such as mutual cooperation cleaning the environment, holding cultural arts activities, and so on, have strengthened solidarity and togetherness among the community, and there is a need for policies that are more inclusive and oriented towards community welfare to improve harmonious social relations in Aek Kanopan City.

Keywords: Social problems, Aek Kanopan City Society, and Qualitative Methods..

Abstrak. Masyarakat didefinisikan sebagai sekumpulan manusia yang saling berinteraksi dalam suatu hubungan sosial. Permasalahan sosial adalah adanya ketidaksesuaian antara harapan (berupa terwujudnya nilai-nilai yang dijunjung masyarakat) dengan kenyataan. Tujuan penelitian ini ialah agar masyarakat menjadi kian lebih tertata bagus dalam hubungannya antara sesama tanpa melanggar ketentuan yang ada dilingkungan sosialnya berada. Selain itu, manfaat yang akan didapatkan dari penelitian ini ialah pemerintah akan mendapatkan apresiasi yang tinggi dari para masyarakat atas kebijaksanaannya yang membawa perubahan untuk meningkatkan kesejahteraan pada bidang kemiskinan dan pengangguran di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yakni wawancara secara mendalam, observasi, dan juga diskusi terfokus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung terhadap peningkatan kesadaran masyarakat karena kebijakan tersebut dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kerja sama dan koordinasi dalam meningkatkan kualitas hidup di Kota Aek Kanopan, Program-program pemerintah yang mendorong kerjasama antarwarga dalam kegiatan sosial, seperti gotong royong membersihkan lingkungan, mengadakan kegiatan seni budaya, dan lain sebagainya, telah memperkuat solidaritas dan kebersamaan di antara masyarakat, dan Perlu adanya kebijakan yang lebih inklusif dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat untuk meningkatkan hubungan sosial yang harmonis di Kota Aek Kanopan.

Kata Kunci: Masalah sosial, Masyarakat Kota Aek Kanopan, dan Metode Kualitatif

A. Pendahuluan

Masyarakat adalah kumpulan dari para individu yang bersama sama hidup dan sering berhubungan satu sama lain. Masyarakat dapat diartikan sebagai sekelompok orang yang hidup bersama, mempunyai rasa persatuan, dan mempunyai kebudayaan yang menganggap dirinya sama. Masyarakat didefinisikan sebagai sekumpulan manusia yang saling berinteraksi dalam suatu hubungan sosial. Mereka pada umumnya mempunyai berbagai kesamaan seperti budaya, wilayah, dan identitas, mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan persatuan yang diikat oleh kesamaan (Donny & Irwansyah, 2020).

Dalam buku pembangunan dan pemberdayaan masyarakat karya (Suaib, 2023), Masyarakat sebagai sekumpulan manusia didalamnya memiliki beberapa unsur yang terkandung didalamnya. Unsur-unsur yang dimaksud yaitu: Masyarakat merupakan manusia yang bisa hidup secara bersama, dapat bergabung untuk waktu yang cukup lama, Masyarakat menyadari bahwa mereka merupakan suatu kesatuan, Masyarakat sebagai suatu sistem hidup bersama. Data terbaru yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) terkait jumlah penduduk, tercatat masyarakat di Indonesia pada tahun 2022 sebesar 275,77 juta jiwa. Dimana telah mengalami peningkatan sebesar 1,13% dibandingkan tahun 2021. Adapun data tersebut dapat dilihat melalui gambar dibawah ini.

Gambar 1 jumlah penduduk Indonesia dari tahun 2013-2022



Sumber : (Badan Pusat Statistik, 2022)

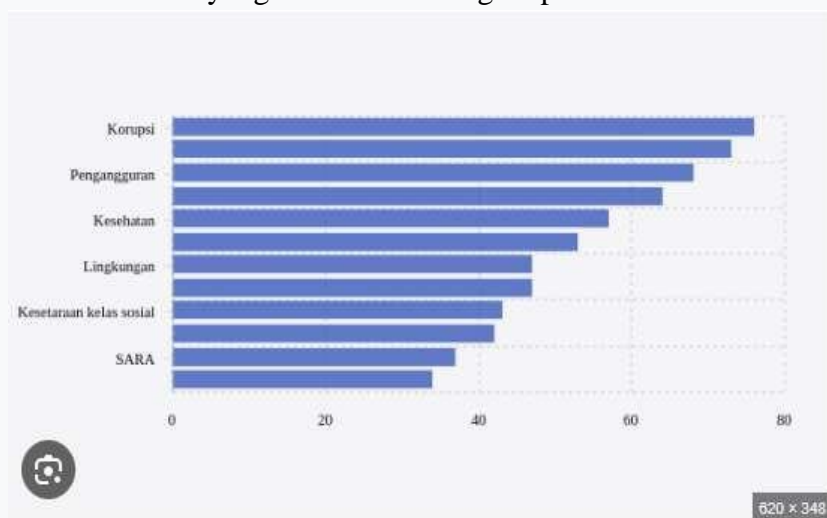
Dengan pertumbuhan penduduk yang kian meningkat, permasalahan sosial dimasyarakat tentu juga semakin bertambah. Permasalahan sosial adalah adanya ketidaksesuaian antara harapan (berupa terwujudnya nilai-nilai yang dijunjung masyarakat) dengan kenyataan. Permasalahan sosial misalnya seperti tingkat kemiskinan yang tinggi, dibarengi jumlah pengangguran yang terus bertambah serta kekerasan dalam rumah tangga yang timbul akibat pergejolan yang ada dilingkungan masyarakat. Permasalahan sosial ini muncul bisa disebabkan karena kondisi ekonomi yang melemah pada suatu keluarga, rendahnya tingkat kesadaran dalam masyarakat, serta adanya dorongan dari pihak luar yang membuat seseorang tergerak untuk melakukan pelanggaran sosial seperti mencuri dan lainnya.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya yang dilakukan Jayyidan dan Abdussatar pada tahun 2020, terkait masalah sosial dan kebijakan publik yang ada di Indonesia. Dalam jurnal ini masalah sosial yang dibahas berupa penggunaan media elektronik sebagai instrumen kejahatan

berupa penipuan. Didapati kesimpulan bahwa peran pemerintah dalam mengatasi sebuah permasalahan sosial sudah cukup benar. Hanya saja masalah sosial yang terjadi butuh waktu penanganan sebagai upaya dari sebuah kebijakan publik. Celah ini dapat dimanfaatkan oleh peneliti untuk menjawab apakah benar pemerintah sudah cukup benar dalam mengatasi sebuah permasalahan sosial.

Dalam laporan Populix yang bertajuk *Expectation of Young Voters in the 2024 Indonesian Presidential Election* edisi Januari 2024. Pada awal Januari 2024 yang lalu, permasalahan dilingkungan masyarakat seperti kemiskinan dan pengangguran telah menduduki posisi ke 2 dan 3 dalam hal masalah sosial-ekonomi yang menurut anak muda harus segera ditangani oleh presiden. Dikarenakan masalah ini kian bertambah parah dari tahun ketahun. Adapun tangga permasalahan sosial-ekonomi dapat dilihat melalui gambar dibawah ini.

Gambar 2 Masalah sosial-ekonomi yang mendesak ditangani presiden 2024 menurut anak muda



Sumber : (Indonesian Presidential Election, 2024).

Atas data yang terdapat melalui gambar diatas, permasalahan seperti kemiskinan dan pengangguran mesti mendapat perhatian lebih dari kalangan pemerintah. Disebabkan tingkat kesejahteraan masyarakat bergantung kepada solusi terhadap masalah tersebut. Penelitian sebelumnya juga tidak menggunakan analisis yang tepat untuk menjelaskan hubungan sosial masyarakat di Kota Aek Kanopan.

Analisis yang digunakan tidak mencerminkan keadaan sebenarnya di masyarakat dan tidak dapat menjelaskan kompleksitas hubungan sosial. Oleh karena itu, penulis ingin mengadakan sebuah penelitian yang berjudul *Pengaruh Kebijakan Pemerintah Terhadap Implementasi Aturan Hubungan Dilingkungan Masyarakat Aek Kanopan*. Tujuan penelitian ini ialah agar masyarakat menjadi kian lebih tertata bagus dalam hubungannya antara sesama tanpa melanggar ketentuan yang ada dilingkungan sosialnya berada. Selain itu, manfaat yang akan didapatkan dari penelitian ini ialah pemerintah akan mendapatkan apresiasi yang tinggi dari para masyarakat atas kebijaksananya yang membawa perubahan untuk meningkatkan kesejahteraan pada bidang kemiskinan dan pengangguran di Indonesia.

B. Tinjauan Teoritis

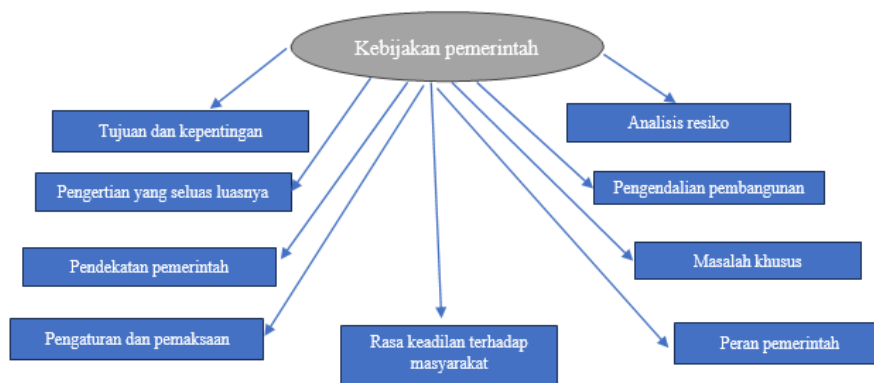
1. Kebijakan Pemerintah

Kebijakan pemerintah adalah seperangkat atau kumpulan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk mengendalikan dan mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, antara lain pendidikan, keuangan, pertanian, kesehatan, dan lain-lain . Menurut Bridgman dan Davis, kebijakan publik/pemerintah adalah segala sesuatu yang dinyatakan dan dilakukan oleh pemerintah, serta juga kebijakan yang tidak

dilakukan oleh pemerintah (Unita,2020). Kebijakan pemerintah ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mengatasi permasalahan yang mengancam kesejahteraan mereka. Posisi suatu kebijakan yang dibuat pemerintah itu sifatnya hanya sementara, sehingga suatu saat bisa diubah. Suatu kebijakan digunakan untuk menjadi pedoman bagi mereka yang akan mengimplementasikannya pada suatu kegiatan atau hal hal terkait (Dian Suluh, 2020).

Kebijakan pemerintah sangat erat kaitannya dengan masyarakat, artinya ketika hendak membuat sebuah kebijakan hendaknya masyarakat diajak sekaligus di berdayakan untuk ambil bagian dalam pemerintahan. Dalam buku karya (Hasdiansyah, 2023), dikatakan tujuan dari pemberdayaan masyarakat ialah agar menciptakan masyarakat yang lebih mandiri, berkelanjutan, dan memiliki kemampuan untuk mengatasi tantangan dan perubahan dalam lingkungan mereka. Dalam jurnal karya (Agus, Mohammad dan Bambang, 2022) dikatakan bahwa peran serta masyarakat secara horisontal akan melibatkan masyarakat secara kolektif untuk mempengaruhi keputusan-keputusan terkait kebijakan pemerintah yang akan dibuat. Pemerintah dalam membuat sebuah kebijakan perlu memperhatikan berbagai macam aspek. Dimana aspek aspek tersebut akan berdampak dari sebuah kebijakan tersebut apabila dijalankan. Aspek aspek tersebut dapat dilihat melalui gambar dibawah ini.

Gambar 3 Hal hal yang menjadi pertimbangan sebelum membuat kebijakan pemerintah.



Pemerintah terkadang membuat sebuah kebijakan tergantung kondisi dan situasi. Seperti permasalahan ketika covid 19 melanda Indonesia beberapa tahun lalu. Pada saat itu, pemerintah menerapkan kebijakan berupa pembatasan aktivitas diluar ruangan sekaligus adanya pemberian bantuan kepada seluruh masyarakat indonesia. Kebijakan pemerintah pada umumnya mencakup berbagai aspek, seperti aspek ekonomi, sosial hingga masuk keranah politik. Dalam ranah permasalahan sosial, pemerintah sendiri telah banyak melakukan kebijakan untuk mengurangi serta meminimalisir permasalahan sosial yang nantinya tumbuh. Dalam jurnal karya (Andi Kasmia, & Shopia, 2021). Dikatakan bahwa untuk mengurangi permasalahan sosial yang ada, pemerintah mesti melakukan beberapa cara seperti memperkuat sanksi terhadap pelanggar hukum dilingkungan masyarakat, adanya sosialisai kepada masyarakat terkait pentingnya menjaga norma sosial, memberikan modal untuk membuka usaha sebagai penciptaan lapangan pekerjaan, serta mempromosikan tingkat kesetaraan antara sesama manusia dilingkungan masyarakat.

2. Hubungan Sosial

Hubungan sosial merupakan interaksi sosial antara individu dengan individu atau kelompok, yang dinamis dan terjadi karena manusia tidak dapat hidup tanpa orang lain. Dalam buku karya (Mohammad Dulkih, 2020), disebutkan jika interaksi sosial menekankan bahwa individu-individu berinteraksi satu sama lainnya dengan menggunakan simbol simbol, yang di dalamnya berisi tanda- tanda, isyarat-isyarat, dan kata-kata yang dipahami dan dimaklukan di antara mereka. Yang artinya hubungan sosial tersebut berjalan karena telah adanya pemahaman dalam menanggapi tanda atau isyarat yang dilakukan sehari hari.

Individu sebagai orang terkecil dalam memulai hubungan sosial mempunyai peran yang sangat penting. Individu dapat mempengaruhi hubungan sosial melalui cara mengubah sikap, perilaku, dan

interaksi dengan orang lain. Kesadaran diri untuk menjalin interaksi (berhubungan) sosial dengan lingkungan dapat mempengaruhi seseorang untuk berubah. Karena pada dasarnya kesadaran diri untuk saling berinteraksi akan banyak memberi manfaat dalam sebuah pergaulan seseorang, tanpa harus memilih-milih orang, apakah itu orang asing ataukah itu orang yang kita kenal (Paulus, Dorna & Romi Mesra, 2024). Seperti contohnya seorang ustad dalam hubungan sosial didaerah sekitar tempat tinggalnya. Aktvitas ustad yang selalu bertaushiyah dan mengajak kepada kebenaran, sedikit demi sedikit akan berpengaruh kepada jamaahnya sehingga memunculkan rasa keamanan dan ketentraman dalam lingkungan Rt/Rw tempatnya tinggal. Sebuah hubungan sosial yang baik dengan orang lain. Namun, terkadang selalu ada alasan mengapa rasa itu tidak muncul dan didapati oleh semua orang. Salah satunya terkait adanya perbedaan ekonomi yang mendorong adanya diskriminasi dalam berhubungan kepada orang lain. Seseorang dengan latarbelakang ekonomi yang mapan (kaya) cenderung akan mendapatkan pengakuan dari para masyarakat. sedangkan yang berlatarbelakang ekonomi yang kurang (miskin) cenderung sulit mendapat pengakuan dalam hubungan sosial dimasyarakat. Sehingga demi sedikit nantinya akan timbul konflik dimana sikaya memamerkan kekayaannya dan si miskin yang tidak terima cenderung marah karena merasa terhina atas kelakuan sikaya. Sehingga terjadilah pelanggaran dalam hubungan sosial dilingkungan masyarakat, seperti adanya perkelahian antar si kaya dengan si miskin.

Pelanggaran terhadap hubungan sosial diatas merupakan sebuah bentuk penyimpangan sosial. Terjadinya perilaku menyimpang diakibatkan tidak tersampainya nilai-nilai sosial dalam masyarakat yang mencita-citakan suatu kedamaian karena pada dasarnya masyarakat cenderung tidak mentaati nilai dan norma (Syahrul Syam dkk, 2019). Pelanggaran terhadap hubungan sosial akan sangat membahayakan, apalagi menyangkut banyak orang. Adanya kegaduhan, serta banyaknya pihak yang dirugikan tentu haru menjadi pertimbangan seseorang apabila ingin melakukan pelanggaran hubungan sosial. Adanya ppelanggaran selalu diikuti sebab dan akibat. Melalui artikel yang diterbitkan Tedy Rizkha pada 24 november 2018 yang diakses lewat ruangguru.com, ada 6 penyebab terjadinya penyimpangan sosial yang merupakan diantaranya sosialisasi tidak sempurna, kebudayaan yang menyimpang, labelling, permasalahan ekonomi, pelampiasan rasa kekecewaan dan perkembangan teknologi seperti gambar yang ada dibawah ini.

Gambar 4 Penyebab terjadinya penyimpangan sosial.



Sumber : Ade Kurniawan

Pelaku pelanggar penyimpangan dalam hubungan sosial akan dikenai hukuman berupa sanksi. Dimana sanksi tersebut tergantung pelanggaran yang dikerjakannya. Jika merugikan secara materi maka akan dikenai sanksi pidana berupa ganti rugi atau penjara. Apabila pelanggaran tersebut tidak terlalu berat dan tidak merugikan secara materi, maka sanksi sosial akan dikenakan berupa teguran atau sanksi yang berupa fisik yang tidak terlalu berat seperti hukuman push up ataupun sit up. Namun apabila pelanggar telah merugikan tidak hanya materi namun hingga menghilangkan nyawa, sanksi berat akan menantinya termasuk

hukuman mati kepada pembunuh, dan seseorang pemakai, pengedar narkoba dalam jumlah besar dilingkungan masyarakat contohnya.

3. Masyarakat Indonesia

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat majemuk yang terdiri dari berbagai suku, adat istiadat, agama, sosial budaya, dan ras. Dengan banyaknya suku yang ada di Indonesia, sudah sepantasnya setiap orang menghargai kemajemukan yang ada dan tampak jelas.. Dalam masyarakat Indonesia, kehidupan sosial dan budaya sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai agama, adat istiadat, dan tradisi yang telah sejak lama dipraktekkan oleh masyarakat. Masyarakat Indonesia juga punya kebiasaan yang sangat kuat dalam berinteraksi antarsesama, seperti gotong royong dan silaturahmi, yang menciptakan masyarakat untuk hidup dalam harmoni dan keselarasan. Hanya saja tidak semua orang dapat memahami kemajemukan sebagai sebuah keberkahan melainkan sebaliknya. Melalui data BPS terkait jumlah suku yang ada di Indonesia, suku Jawa menempati jumlah suku paling banyak di Indonesia. sedangkan suku suku lainnya berada dibawahnya, adapun data terhadap jumlah suku tersebut dapat dilihat melalui gambar dibawah ini.

Gambar 5 Jumlah 10 besar suku terbanyak di Indonesia



Sumber : (Badan Pusat Statistik, 2010)

Dikatakan dalam jurnal karya Fitri dan Fatma yang terbit tahun 2022. Dalam masyarakat multikultural, keberagaman budaya harus benar benar dijaga dan dihormati agar tidak terjadi perpecahan. Persatuan dan kesatuan merupakan salah satu upaya meminimalisir terjadinya perpecahan. Motto kita yakni Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda namun satu, dan menjadi landasan kita untuk menjaga keberagaman tersebut. Persatuan dan kesatuan juga mewujudkan cita-cita Indonesia yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila. Masyarakat Indonesia sangat memegang erat Pancasila sebagai landasan dalam segala aktivitasnya sehari hari.

Dikatakan melalui buku karya Sumarto yang terbit tahun 2019, bahwa Pancasila dan masyarakat tidak bisa terpisahkan, karena setiap nilai nilai Pancasila ada disetiap sendi kemasyarakatan, yaitu nilai seperti kehidupan beragama, nilai kehidupan sosial untuk saling membantu, nilai toleransi, nilai saling menghormati/menghargai serta dengan nilai lain yang terkandung didalamnya.

C. Metode

Penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang berfokus pada pengumpulan dan analisis data yang tidak dapat diukur secara kuantitatif. Dalam metode ini, peneliti tidak mencoba untuk mengukur atau menghitung data, melainkan lebih fokus pada pengumpulan data yang berupa kata-kata, gambar, atau simbol-simbol yang dapat memberikan gambaran tentang fenomena yang diteliti. Pendekatan yang akan dipakai pada metode penelitian ini yakni berupa pendekatan fenomenologis dan interpretif. Pendekatan fenomenologis dan interpretif adalah suatu pendekatan penelitian yang berfokus pada memahami makna dan pengalaman hidup manusia secara langsung. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yakni wawancara secara mendalam, observasi, dan juga diskusi terfokus.

Adapun data yang nantinya didapatkan akan dianalisis melalui analisis tematik dan juga analisis konteks. Peneliti melakukan analisis tematik terhadap data yang dikumpulkan untuk menemukan tema dan makna yang terkait dengan pengaruh kebijakan pemerintah terhadap hubungan sosial. Peneliti juga akan melakukan analisis konteks untuk memahami bagaimana kebijakan pemerintah mempengaruhi perilaku masyarakat dan bagaimana perilaku tersebut mempengaruhi kebijakan pemerintah. Metode penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk memahami makna dan konteks sosial yang lebih dalam, serta memungkinkan peneliti untuk menemukan pola hubungan interaktif yang tidak terlihat dengan metode kuantitatif. Namun, Metode penelitian kualitatif memerlukan waktu yang lebih lama dan sumber daya yang lebih besar serta rentan terhadap subjektivitas peneliti.

D. Hasil dan Pembahasan Penelitian

Berdasarkan temuan observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti di Aek Kanopan dalam hubungannya antara sesama masyarakat tanpa melanggar ketentuan yang ada di lingkungan sosialnya berada. Penelitian bersifat kualitatif yang mana memungkinkan peneliti untuk memahami makna dan konteks sosial yang lebih dalam, serta memungkinkan peneliti untuk menemukan pola hubungan interaktif. Hasil penelitian yang didapat dari beberapa informan akan dipaparkan sebagai berikut :

Pengaruh Kebijakan Pemerintah Terhadap Implementasi Aturan Hubungan Masyarakat Di Aek Kanopan

Berdasarkan observasi dan wawancara, peneliti telah menemukan apa saja kebijakan-kebijakan Pemerintah terhadap implementasi aturan hubungan masyarakat di Aek Kanopan dan pengaruh yang dirasakan masyarakat terhadap kebijakan Pemerintah terhadap implementasi aturan hubungan masyarakat di Aek Kanopan.

1. Kebijakan-kebijakan Pemerintah terhadap implementasi aturan hubungan masyarakat di Aek Kanopan.

Kebijakan Pemerintah terhadap penyediaan fasilitas umum seperti taman kota, pusat kegiatan masyarakat, dan tempat ibadah telah meningkatkan interaksi sosial antar warga. Warga lebih sering berkumpul dan berinteraksi di tempat-tempat tersebut, sehingga memperkuat jalinan hubungan sosial di antara mereka. Berikut hasil wawancara dengan informan RS (35 tahun) mengatakan bahwa “Saleleng pamaretah unga mabaem taman kota ni jolma sahuta sering parpunguan i tempat hi” (selama pemerintah telah membangun taman kota, warga sering berkumpul di tempat tersebut).

Program-program pemerintah yang mendorong kerjasama antarwarga dalam kegiatan sosial memiliki beberapa alasan penting. Program ini dapat meningkatkan solidaritas dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kerjasama dan kebersamaan dalam masyarakat. Selain itu, program ini juga dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengelola potensi dan mengembangkan kemampuan diri sendiri melalui pemberdayaan masyarakat, seperti gotong royong membersihkan lingkungan, mengadakan kegiatan seni budaya, dan lain sebagainya, telah memperkuat solidaritas dan kebersamaan di antara masyarakat.

Berikut hasil wawancara dengan informan SA (45 tahun) mengatakan bahwa “*wonten ing*

ngriki asring dipunwontenaken gotong royong kangge ngresiki lingkungan, ing wulan Suro dipunwontenaken pagelaran wayang kulit” (disini sering diadakan gotong royong membersihkan lingkungan, jika bulan suro diadakan pementasan wayang kulit).

Kebijakan pendidikan dan pelatihan yang diadakan oleh pemerintah telah membantu meningkatkan keterampilan dan pengetahuan masyarakat, sehingga memperkuat hubungan sosial antarwarga melalui saling berbagi pengetahuan dan pengalaman. Salah satu contohnya adalah Program Pengembangan Keterampilan Pegawai Negeri Sipil yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pengembangan. Program tersebut mencakup pelatihan profesional, manajerial, dan kepemimpinan, serta peningkatan efisiensi, efektivitas, dan kualitas tugas yang dilakukan dengan semangat kerja sama dan tanggung jawab.

Berikut hasil wawancara dengan informan SD (37 tahun) mengatakan bahwa *“Kawicaksanaan pemerintah tumrap program pengembangan ketrampilan PNS banget mbiyantu ningkatake produktivitas kerja”* (kebijakan pemerintah terhadap program pengembangan keterampilan Pegawai Negeri Sipil sangat membantu untuk meningkatkan produktivitas kerja).

Kebijakan pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kota Aek Kanopan telah berdampak positif terhadap hubungan sosial. Program pemberdayaan ekonomi masyarakat, seperti pengembangan usaha dan pendidikan, telah meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengelola potensi dan mengembangkan kemampuan diri sendiri. Selain itu, program-program sosial seperti JUMSIH dan bakti sosial telah meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kerjasama dan kebersamaan dalam masyarakat. Dengan demikian, hubungan sosial di Kota Aek Kanopan telah menjadi lebih kuat dan solidaritas masyarakat telah meningkat.

Berikut hasil wawancara dengan informan MH (36 tahun) *“Adong do Godang amalolan ni pamaritah lao paturehon ekonomi ibagasan paturehon hapogoson hi jolma na adong di kota Aek kanopan non tarsongon program jumsi”* (ada banyak kebijakan pemerintah terutama pemberdayaan ekonomi dalam menangani kemiskinan masyarakat di kota Aek Kanopan ini seperti program JUMSIH).

2. Pengaruh yang dirasakan masyarakat terhadap kebijakan Pemerintah terhadap implementasi aturan hubungan masyarakat di Aek Kanopan.

Kebijakan yang berorientasi pada kemajuan dan kemakmuran masyarakat dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat karena program-programnya berfokus pada meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, masyarakat menjadi lebih sadar akan pentingnya peran aktif mereka dalam mencapai kemajuan dan kemakmuran, serta meningkatkan kesadaran tentang pentingnya kerjasama dan kebersamaan dalam mencapai tujuan tersebut. Partisipasi masyarakat juga meningkat karena mereka merasa terlibat dan memiliki peran aktif dalam proses pengembangan masyarakat.

Berikut hasil wawancara dengan informan NP (28 tahun) *“yen kabijakan pemerintah positif kanggo kemajuan lan kemakmuran masyarakat, masyarakat bakal semangat banget nindakake program kasebut”* (jika kebijakan pemerintah bersifat positif untuk kemajuan dan kemakmuran masyarakat maka masyarakat sangat antusias dalam menjalankan program- program tersebut).

Kebijakan yang tidak memperhatikan kepentingan masyarakat dapat menyebabkan ketidakpuasan dan konflik sosial. Kebijakan yang tidak berorientasi pada kepentingan masyarakat dapat menimbulkan rasa tidak adil dan tidak puas, sehingga masyarakat menjadi tidak setuju dengan kebijakan yang diterapkan. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpuasan dan konflik sosial, serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya peran aktif mereka dalam mencapai kemajuan dan kemakmuran.

Berikut hasil wawancara dengan informan MD (47 tahun) *“yen kawicaksanaan pamarentah ora nggatekake kepentingane masyarakat, bisa nuwuhake konflik”* (jika kebijakan pemerintah tidak memperhatikan kepentingan masyarakat hal tersebut dapat menimbulkan konflik).

Kebijakan yang inklusif dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kerjasama dan kebersamaan dalam mencapai tujuan yang lebih baik. Dengan demikian, masyarakat menjadi lebih sadar akan pentingnya peran aktif mereka dalam mencapai kemajuan dan kemakmuran, serta meningkatkan kesadaran tentang pentingnya kebersamaan dan kerjasama dalam mencapai tujuan tersebut.

Berikut hasil wawancara dengan informan AD (43 tahun) “*yen kabijakan pemerintah ngutamakake kesejahteraan masyarakat, masyarakat bakal ngerti pentinge gotong royong kanggo nggayuh tujuan kasebut*” (jika kebijakan pemerintah mengedepankan kesejahteraan masyarakat maka masyarakat akan sadar pentingnya kerjasama dalam mencapai tujuan tersebut).

Kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung terhadap peningkatan kesadaran masyarakat karena kebijakan tersebut dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kerja sama dan koordinasi dalam meningkatkan kualitas hidup. Kebijakan pemerintah yang terkait dengan hubungan sosial dapat membentuk suatu karakter peduli lingkungan di kalangan masyarakat, sehingga masyarakat akan lebih peduli terhadap lingkungan dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial.

Berikut hasil wawancara dengan informan HD (40 tahun) “*kawicaksanan pemerintah sejatine nduwe pengaruh langsung marang kesadaran masyarakat babagan pentinge gotong royong kanggo ningkatake kualitas urip*” (kebijakan pemerintah sebenarnya memiliki dampak langsung terhadap kesadaran masyarakat tentang pentingnya kerjasama dalam menaikkan kualitas hidup).

E. Kesimpulan

1. Simpulan

Kesimpulan dari penelitian berjudul Pengaruh Kebijakan Pemerintah Terhadap Hubungan Sosial Masyarakat di Kota Aek Kanopan dapat disajikan sebagai berikut:

- a. Penelitian ini menemukan bahwa kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung terhadap peningkatan kesadaran masyarakat karena kebijakan tersebut dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kerja sama dan koordinasi dalam meningkatkan kualitas hidup. Melalui kebijakan ini, nantinya masyarakat akan lebih peduli terhadap lingkungan dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial.
- b. Program-program pemerintah yang mendorong kerjasama antarwarga dalam kegiatan sosial, seperti gotong royong membersihkan lingkungan, mengadakan kegiatan seni budaya, dan lain sebagainya, telah memperkuat solidaritas dan kebersamaan di antara masyarakat. Selain itu, program ini juga dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengelola potensi dan mengembangkan kemampuan diri sendiri melalui pemberdayaan masyarakat.
- c. Perlu adanya kebijakan yang lebih inklusif dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat untuk meningkatkan hubungan sosial yang harmonis di Kota Aek Kanopan. Kebijakan yang inklusif dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat nantinya dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kerjasama dan kebersamaan dalam mencapai tujuan yang lebih baik. Dalam hal ini, kebijakan pemerintah yang tepat dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sedangkan kebijakan yang tidak tepat dapat menurunkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan harus dilakukan dengan cara yang efektif dan efisien.

2. Saran

Berdasarkan penelitian mengenai Pengaruh Kebijakan Pemerintah terhadap Hubungan Sosial Masyarakat di Kota Aek Kanopan" beberapa saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

- a. Mendorong Peningkatan Partisipasi Masyarakat: Disarankan agar pemerintah lebih aktif melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan yang berdampak pada

hubungan sosial. Partisipasi masyarakat dapat membantu memperkuat rasa memiliki dan tanggung jawab bersama terhadap kebijakan yang diterapkan.

- b. Memperkuat Program Pendidikan dan Pelatihan: Diperlukan peningkatan dan diversifikasi program pendidikan dan pelatihan yang dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuan masyarakat. Hal ini akan membantu memperkuat hubungan sosial melalui saling berbagi pengetahuan, pengalaman, dan meningkatkan kesadaran sosial.
- c. Menjaga Keseimbangan dalam Implementasi Kebijakan: Penting bagi pemerintah untuk menjaga keseimbangan dan keadilan dalam implementasi kebijakan, sehingga tidak terjadi disparitas atau konflik sosial di masyarakat. Perlunya kebijakan yang inklusif dan berpihak pada kepentingan seluruh lapisan masyarakat.
- d. Mendorong Kerjasama Antar Lembaga dan Stakeholder: Diperlukan kerjasama yang erat antara pemerintah, lembaga masyarakat, sektor swasta, dan stakeholder lainnya dalam implementasi kebijakan yang berdampak pada hubungan sosial. Kolaborasi ini dapat memperkuat sinergi dan efektivitas kebijakan.
- e. Monitoring dan Evaluasi Secara Berkala: Perlu adanya mekanisme monitoring dan evaluasi kebijakan secara berkala untuk memantau dampak kebijakan terhadap hubungan sosial masyarakat. Hasil evaluasi dapat digunakan sebagai dasar perbaikan dan pengembangan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

F. Ucapan Terimakasih

Puji dan Syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan karya ilmiah ini. Penulisan karya ilmiah ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Sosiologi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Terbuka. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, cukup sulit bagi saya untuk menyelesaikan karya ilmiah ini. Oleh sebab itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Kepada Universitas Terbuka, selaku institusi tempat penulis menimba ilmu dan memperoleh berbagai pengetahuan yang berharga dalam menunjang penelitian ini,
2. Kepada Bapak Romi Mesra, S.Pd., M.Pd, selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, bimbingan dan dukungan yang sangat berharga selama proses penelitian serta penulisan karya ilmiah
3. Kepada keluarga dan teman-teman penulis, yang senantiasa memberikan do'a, dukungan, dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik.
4. Kepada warga Aek Kanopan, yang telah membantu dan mendukung pelaksanaan penelitian ini melalui berbagai informasi dan data yang diberikan.

G. Daftar Pustaka

- Andi, A., Kasmia, & Shopia, S. (2021). Membangun Jiwa Peduli, Kritis, Dan Kreatif Generasi Muda Terhadap Pencarian Masalah Sosial Yang Terjadi Di Tengah Masyarakat. *Jurnal Inovasi Penelitian*. 2(2). Hal 473-484.
- Agus, W., Mohammad, S., & Bambang, S. (2022). Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Kota Semarang. *Jurnal Ilmu Hukum*. 7(1). Hal 133-145.
- Badan Pusat Statistik, 2010 Badan Pusat Statistik, 2022
- Fitri, L, S., & Fatma, U, N. (2022). Nilai-Nilai Sila Persatuan Indonesia Dalam Keberagaman Kebudayaan Indonesia. *Jurnal Global Citizen*. 11(1). Hal 79-85.
- Indonesian Presidential Election, 2024
- Jayyidan, F, M., & Abdussatar, K. (2020). Masalah Sosial dan Kebijakan Publik di Indonesia (Studi Kasus UU ITE No. 19 Tahun 2016). *Journal of Governance Innovation*. 2(1). Hal 22- 31.

- Syahrul S dkk. (2019). Kontrol Sosial Masyarakat Terhadap Perilaku Menyimpang Remaja (Kasus Pacaran di Taman Syariah Kota Parepare). *Journal Of Sociology*. 2(1). Hal 61-72.
- Susila, A, F, C. (2019). Hukum dan Studi Penelitian Empiris: Penggunaan Metode Survey sebagai Instrumen Penelitian Hukum Empiris. *Administrative Law & Governance Journal*. 2(4). Hal 697-709.
- Paulus, R, T., Dorna, L, S., & Romi, M. (2024). Pola Interaksi dan Pola Hidup Mahasiswa Kos- Kosan di Tataaran Patar. *Education and Social Science Journal*. 1(2). Hal 135-138.
- Donn,y P., & Irwansyah. (2020). Memahami Masyarakat Dan Perspektifnya. *JMPIS*. 1(1). Hal 163- 175.
- Moh, D. (2020). Sistem Sosial di Indonesia. Bandung. LP2M UIN SGD Bandung.
- Suaib. (2023). Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat. Indramayu. Adanu Abimata. Sumarto. (2019). Pancasila dan NKRI. Jambi. Literasiologi.
- Hasdiansyah, A. (2023). Pemberdayaan Masyarakat. Purbalingga. Eureka Media Aksara
- Dian, S, K, D. (2020). Buku Ajar Kebijakan Publik; Proses, Implementasi dan Evaluasi. Yogyakarta.

Samudra Biru

UNITA. (2020). Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial. *Journal UNITA*. 1(1). Hal 1-10